

ABSTRAK

Program *Tax Amnesty* yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis penerimaan negara melalui pengungkapan harta, termasuk tanah dan bangunan yang belum tercatat secara benar dalam sistem perpajakan. Dalam konteks ini, peralihan hak atas tanah menjadi salah satu instrumen penting yang memerlukan jaminan kepastian hukum dan transparansi. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, akuntabilitas, serta keterbukaan data pada setiap proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh peserta *Tax Amnesty*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran notaris dalam mendukung transparansi peralihan hak atas tanah melalui *Tax Amnesty*, mengidentifikasi tanggung jawab hukum yang melekat, serta menelaah implikasi yuridis apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga transparansi dan integritas transaksi. Notaris wajib memastikan kesesuaian data kepemilikan, status pajak, serta dokumen pendukung agar peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan *Tax Amnesty*. Tanggung jawab hukum notaris meliputi aspek administrasi, etika profesi, hingga pertanggungjawaban perdata maupun pidana apabila akta yang dibuat menimbulkan kerugian atau sengketa. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran notaris sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan *Tax Amnesty* khususnya terkait peralihan hak atas tanah. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan integritas profesi notaris guna menjamin kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Notaris, *Tax Amnesty*, Transparansi